



# Jurnal Ekonomika dan Bisnis

Journal homepage: <https://journal.feb-uniss.ac.id/home>  
ISSN Cetak : 2356-2439, ISSN Online : 2685-2446

## Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran Tahun 2016 - 2020

Clara Yully Diana Ekaristi<sup>(1)</sup>, Apip<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup>Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, <sup>(2)</sup>Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

<sup>(1)</sup>[ekaristi874@gmail.com](mailto:ekaristi874@gmail.com), <sup>(2)</sup>[apip746@gmail.com](mailto:apip746@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Diterima 15 April 2022  
Disetujui 19 April 2022  
Dipublikasikan 25 April 2022

#### Kata Kunci:

Pendapatan asli daerah,  
Akuntabilitas, Kinerja  
Pemerintah daerah.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan kabupaten Demak. Objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten Demak tahun 2016-2020. Metode penelitian menggunakan studi kasus untuk menganalisis data sekunder yang bersifat deskriptif kuantitatif melalui metode dokumentasi. Data sekunder yang dianalisis berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Demak tahun anggaran 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah kabupaten Demak menunjukkan kinerja yang baik namun masih ada beberapa rasio yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki seperti rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal.

### PENDAHULUAN

Era globalisasi ekonomi dan perubahan konsep perencanaan nasional harus sesuai dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004. Otonomi daerah yang diberikan kepada kabupaten dan kota menjadikan pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya berada di Pemerintah daerah (Bastian dan Supriyanto, 2002). Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan sistem pengelolaan keuangannya harus memenuhi beberapa asas yaitu tertib, transparan, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perlu didukung dengan kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah baik itu yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota disusun berdasarkan aturan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk penilaian kinerja dalam pengelolaan keuangannya (Mardiasmo, 2004:36-37). Akuntabilitas laporan keuangan sebagai salah satu syarat bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat yang tidak cukup dilakukan secara lisan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akan akuntabilitas pemerintah, dibidang keuangan, laporan

pertanggungjawaban keuangan perlu dipublikasikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Tidak semua pihak yang berkepentingan memiliki pemahaman yang baik dalam menginterpretasikan laporan keuangan namun keterbatasan tersebut mampu diatasi dengan Analisis laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Daerah, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (Nurhayati, 2014).

Hasil dari analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja yang telah dicapai pemerintah daerah selama ini yang berguna untuk perencanaan kinerja pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Dengan melakukan analisis laporan keuangan dapat diketahui pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ke tahun, kegiatan analisis ini membutuhkan teknik atau cara tertentu yang tepat agar hasil analisis ini dapat berguna bagi para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan. Ada beberapa teknik untuk menganalisis laporan keuangan yang sering digunakan diantaranya rasio kemandirian keuangan daerah (Abdul Halim, 2007), rasio kemampuan keuangan daerah (Deasy Susana, 2018), rasio efektivitas (Kartika, 2015), rasio derajat desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2007), dan rasio belanja (RF. Ramadani, 2016). Cara menganalisis laporan keuangan, dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai pada suatu daerah dan satu periode ke periode lain, sehingga dapat diinterpretasikan bagaimana kecenderungan yang sering muncul. Hasil analisis laporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja keuangan suatu pemerintah daerah. Dengan dilakukannya pengawasan dan evaluasi secara berkala dalam memantau perkembangan suatu daerah dan untuk evaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dengan pelaksanaannya (Zuhri, 2015). Terdapat empat karakteristik yang digunakan untuk menentukan baik atau tidaknya kualitas laporan keuangan antara lain : mudah untuk dipahami, cukup relevan, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan (Nurhayati, 2014).

Kewenangan untuk mengatur sendiri sesuai kepentingan masyarakat dan membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri terkait dengan desentralisasi dibidang keuangan, setiap pemerintah daerah diharapkan mampu memiliki sistem yang transparan, efektif dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Zuhri, 2015) dan memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih baik. Maka fokus terhadap pengelolaan pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah (Mahmudi, 2010). Pembayaran pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pembiayaan rumah tangga daerah, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat. Kabupaten Demak adalah bagian dari provinsi Jawa Tengah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, meskipun pada kenyataannya terdapat daerah yang masih memiliki ketergantungan pada aliran dana dari pemerintah pusat karena terlalu minimalnya pendapatan asli daerah (Kartika et al, 2016). Hal ini merupakan permasalahan keuangan daerah otonomi yang cukup krusial untuk diteliti lebih lanjut adalah kemandirian keuangan daerah kabupaten atau kota.

Permasalahan lain yang cukup penting adalah mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan Daerah untuk merealisasikan pendapatan asli daerah yang dianggarkan sebagai salah satu indikator (Dwiranda, 2007) dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002) untuk memperbaiki suatu perencanaan kegiatan dan implementasinya dalam penyediaan barang dan pelayanan publik sesuai dengan kondisi daerah dengan tetap berpedoman pada tujuan pembangunan sosial dan ekonomi baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah (Tiyaningsih, 2009) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pengguna atau pihak yang berkepentingan mengenai laporan tentang bagian-bagian pengeluaran daerah yang didistribusikan untuk pengukuran operasional (Farida, 2019).

Beberapa penelitian terkait dengan Analisis laporan realisasi keuangan pemerintah daerah telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Ai Siti Farida (2019) membuktikan rasio kemandirian pemerintah daerah rendah sekali, selain itu rasio belanja modal terhadap belanja operasional cenderung lebih mengutamakan belanja operasional dari pada belanja modal. Kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi pendapatan asli daerah dikatakan tidak efisien, sedangkan rasio efektivitas menunjukkan sudah berjalan efektif.

Penelitian Kartika (2016) juga membuktikan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah tergolong sangat rendah dengan pola hubungan yang instruktif, rasio efektivitas pendapatan asli pemerintah daerah tergolong sangat efektif, kinerja keuangan pemerintah daerah tergolong sangat efisien. Penelitian Ai Siti Farida (2019) dan Kartika (2016) berbeda dengan hasil penelitian Wita Liantino (2018) yang membuktikan kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dianggap tinggi dan terdapat pola delegasi, rasio efektivitas pendapatan asli daerah kinerja keuangan pemerintah daerah termasuk kategori yang belum efektif sehingga masih harus mengoptimalkan pengelolaan di bidang sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang dinilai berpotensi mampu menambah pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dapat dinyatakan tidak efisien sehingga pemerintah daerah perlu mengurangi besaran jumlah belanja yang dikeluarkan, rasio keserasian diartikan cukup baik apabila biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam mendukung pemenuhan kegiatan untuk kebutuhan pembangunan pemerintahan daerah tersebut, sedangkan rasio pertumbuhan secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan sehingga berpengaruh terhadap kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima suatu daerah. Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah derajat desentralisasi fiskal untuk mengelola keuangan pemerintah daerah. Menurut Tiyaningsih (2009) dalam penelitiannya mampu membuktikan bahwa adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat besar hal ini ditunjukkan dengan tingginya derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah, yang berarti belum mandiri, karena banyaknya bantuan pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah yang tidak bisa dibiayai melalui pendapatan asli daerah saja.

Selain hasil penelitian Tiyaningsih (2009), penelitian oleh Rinaldi Syahputra (2017) juga menyebutkan semakin rendahnya derajat desentralisasi yang terjadi di pemerintah daerah, maka menggambarkan tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat. Mengacu pada pendapat para ahli serta hasil pembuktian dalam penelitian sebelumnya, analisa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio kemampuan keuangan daerah, desentralisasi fiskal, dan rasio keserasian pembelanjaan dalam pengelolaan bidang keuangannya.

Banyak berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah salah satu faktor pertama yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah kemandirian keuangan daerah perlu diterapkan untuk menunjang dan memperkuat kinerja pemerintah daerah. Dari faktor kedua hingga kelima yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu akuntabilitas dan transparansi untuk memperbaiki perencanaan dan implementasi dalam penyediaan barang dan pelayanan publik sesuai dengan kondisi dan preferensi daerah dengan tetap berpedoman pada tujuan pembangunan sosial dan ekonomi baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah (Tiyaningsih, 2009) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pengguna atau pihak yang berkepentingan terhadap laporan pengeluaran daerah yang didistribusikan untuk pengukuran operasional (Farida, 2019). Peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi ditingkatkan dengan tujuan untuk memperluas otonomi daerah dan kemandirian daerah (Rinaldi Syahputra, 2017).

Indonesia sebagai negara demokratis menuntut transparansi dalam manajemen keuangan negara terhadap publik sehingga akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan yang akuntabel diperlukan keterbukaan (transparansi) (Siahaan, 2016) dan kepatuhan terhadap peraturan tata kelola yang baik. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja yang telah dicapai pemerintah daerah serta untuk mengestimasi kinerja pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian berjudul **"Analisis Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak"**.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Suharsimi (2002), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menyampaikan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Penelitian ini menggunakan objek Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dengan mengambil data dari <http://ppid.demakkab.go.id/>. Pengambilan data di tempat yang tertera di atas dengan tujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak selama periode 2016-2020. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti, oleh karena itu subjek pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Demak. Objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten Demak tahun 2016-2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui media dokumentasi. Melalui pencarian data sekunder yang dikumpulkan melalui tahapan dokumentasi. Data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2016-2020.

## HASIL

Analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dilakukan dengan *time series method* yang dijelaskan sebagai berikut :

### Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan rumah tangga pemerintah, belanja modal dan pelayanan masyarakat sebagai imbal balik atas pembayaran pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan. Menurut Halim (2002) Rasio kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dari besaran realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi total pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer pusat pemerintah, provinsi dan pinjaman. Terdapat pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah yang mampu menunjukkan kemandirian keuangan daerah yaitu sebesar 0-25% kemampuan keuangan dikategorikan rendah sekali terdapat pola hubungan instruktif, 25%-50% rendah dengan kategori pola hubungan konstruktif, 50%-75% sedang dengan kategori pola hubungan partisipatif, sedangkan 75%-100% menunjukkan kemampuan keuangan kategori tinggi dengan pola hubungan delegasi (Prasoko, JA, 2019).

Berdasarkan data target dan realisasi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan selama tahun 2016-2020 dapat diketahui besaran nilai rasio kemandirian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{287.457.500.571}{1.660.227.785.030} \times 100\% = 17,31\% \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{309.612.407.201}{1.649.152.355.584} \times 100\% = 18,77\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{342.324.870.245}{1.701.191.616.943} \times 100\% = 20,12\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{407.400.540.994}{1.845.087.669.790} \times 100\% = 22,08\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{439.694.424.385}{1.493.919.826.469} \times 100\% = 29,43\% \end{aligned}$$

### Analisis Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah diukur dengan Analisis Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Pemerintah daerah yang memiliki rasio Indeks Kemampuan Rutin yang tinggi maka semakin tinggi pula

kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah (Halim, 2007) yang diwujudkan dengan proporsi antara pendapatan asli daerah dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat (Mudrajat, 1997).

Tahun 2016	=	$\frac{1.952.459.922.200}{1.763.395.978.996}$	x	100%	=	110,72%
Tahun 2017	=	$\frac{2.060.864.280.423}{1.655.418.381.539}$	x	100%	=	124,49%
Tahun 2018	=	$\frac{2.143.306.258.595}{1.702.389.136.934}$	x	100%	=	125,90%
Tahun 2019	=	$\frac{2.362.016.248.793}{1.899.488.390.627}$	x	100%	=	124,35%
Tahun 2020	=	$\frac{2.333.738.996.799}{1.849.147.363.773}$	x	100%	=	126,21%

### Analisis Rasio Efektivitas

Perbandingan pendapatan asli daerah yang direncanakan sebelumnya dengan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah digambarkan dengan rasio efektivitas (Halim 2004). Menurut Vurry, dkk, 2018 Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai sekurang-kurangnya sebesar 1 (satu) atau 100 persen yang berarti semakin tinggi rasio efektivitas menunjukkan kemampuan daerah yang semakin baik. Perhitungan rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara *outcome* dan *output* yang mengarah pada suatu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2018). Rasio efektivitas pendapatan asli daerah adalah rasio yang menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengorganisasikan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah ditargetkan dengan membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah yang dianggarkan (Mahmudi, 2019:141). Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kemampuan daerah (Faud, 2016). Pengukuran rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui berhasil tidaknya pemerintah daerah Kabupaten Demak dalam mencapai tujuan anggaran, diproyeksikan sebagai berikut :

Tahun 2016	=	$\frac{287.457.500.571}{275.752.525.000}$	x	100%	=	104,24%
Tahun 2017	=	$\frac{309.612.407.201}{283.670.499.000}$	x	100%	=	109,15%
Tahun 2018	=	$\frac{342.324.870.245}{308.845.276.400}$	x	100%	=	110,84%

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{407.400.540.995}{377.428.931.462} \times 100\% = 107,94\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{439.694.424.386}{367.991.804.422} \times 100\% = 119,48\% \end{aligned}$$

### Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Tiyaningsih (2009), desentralisasi meliputi beberapa makna yang terkait distribusi kewenangan dari pusat ke daerah, yang berarti distribusi kewenangan pemerintah pusat dalam bentuk kewenangan dekonsentrasi dan delegasi kewenangan. Yang pertama merupakan pemberian kewenangan ke organ pemerintah pusat didaerah dan yang kedua adalah delegasi kewenangan dari pemerintah pusat ke organ lokal, sedangkan perpindahan kewenangan atas otonomi daerah yang disertai dengan realokasi sumber penerimaan dan pembiayaan disebut devolusi kewenangan. Pada penelitian ini desentralisasi fiskal mengarah pada definisi devolusi. Desentralisasi merupakan pelepasan tanggungjawab dalam urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah kabupaten Demak yang dilihat dengan rasio pendapatan asli daerah dengan Total Penerimaan Daerah (Halim 2004). Untuk melihat kemampuan pemerintah daerah kabupaten Demak dalam derajat desentralisasi fiskalnya, dapat di ilustrasikan dalam perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{287.457.500.571}{1.952.459.922.200} \times 100\% = 14,72\% \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{309.612.407.201}{2.060.864.280.423} \times 100\% = 27,62\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{342.324.870.245}{2.143.306.258.595} \times 100\% = 24,36\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{407.400.540.995}{2.362.016.248.793} \times 100\% = 23,98\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{439.694.424.386}{2.333.738.996.799} \times 100\% = 15,52\% \end{aligned}$$

### Analisis Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian memberikan alokasi dana belanja rutin dan belanja modal (belanja pembangunan) secara optimal, sehingga semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin (operasional) akan berakibat persentase belanja modal (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana bagi masyarakat cenderung lebih kecil. Rasio keserasian terhadap belanja rutin dapat diformulasikan dengan perbandingan total belanja rutin terhadap total belanja daerah, sedangkan rasio keserasian belanja modal digambarkan dengan perbandingan Total belanja pembangunan terhadap total belanja. Menurut Halim (dalam Pramono, 2014) rasio keserasian belanja merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya

pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin maka semakin kecil persentase dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan. Dalam rasio keserasian terdapat dua perhitungan yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal (pembangunan). Rasio belanja operasi menggambarkan besaran belanja daerah yang dialokasikan selama satu tahun anggaran yang bersifat jangka pendek dan sifatnya rutin atau berulang. Proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60%-90% (Mahmudi, 2019:162). Sedangkan rasio belanja modal menginformasikan besaran belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Menurut Mahmudi, 2019 proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah berkisar antara 5%-20%. Namun belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi dan belanja modal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan dalam mencapai pertumbuhan daerah yang ditargetkan.

Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Demak selama tahun 2016 – 2020 yang diproyeksikan dengan perhitungan rasio keserasian belanja operasi dan rasio belanja modal sebagai berikut:

**Belanja modal**

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{635.402.747.952}{1.763.395.978.996} \times 100\% = 36,03\% \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{457.258.575.949}{1.655.418.381.539} \times 100\% = 27,62\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{414.681.322.203}{1.702.389.136.934} \times 100\% = 24,36\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{455.482.429.713}{1.899.483.390.627} \times 100\% = 23,98\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{286.913.547.351}{1.849.147.363.773} \times 100\% = 15,52\% \end{aligned}$$

**Belanja Operasi**

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.127.365.105.794}{1.763.395.978.996 + 1.198.066.016.590} \times 100\% = 63,93\%$$



Tahun 2017	=	$\frac{1.655.418.381.539}{1.702.389.136.934}$	x	100%	=	72,37%
Tahun 2018	=	$\frac{1.287.691.578.731}{1.899.483.390.627}$	x	100%	=	75,64%
Tahun 2019	=	$\frac{1.444.005.960.914}{1.849.147.363.773}$	x	100%	=	76,02%
Tahun 2020	=	$\frac{1.537.320.153.692}{1.849.147.363.773}$	x	100%	=	83,14%

## PEMBAHASAN

### 1) Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2019 yang berada pada kisaran 0-25% menunjukkan kemampuan keuangan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif yang berarti masih bergantung kepada bantuan dari pusat dan provinsi selama empat tahun berturut-turut, sedangkan tahun anggaran 2020 terdapat peningkatan dari tahun tahun sebelumnya. Tahun 2020 dari sisi pendapatan asli daerah terdapat peningkatan yang signifikan sebesar Rp. 439.694.424.385,95 yang dapat menggambarkan kabupaten Demak memiliki nilai yang baik setiap tahunnya karena pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun rasio kemandirian tahun 2020 terdapat peningkatan sebesar 7,35% dari tahun 2019 sehingga menunjukkan kemandirian kabupaten Demak masih tergolong rendah dengan angka sebesar 29.43% dan pola hubungan konstruktif terhadap pemerintah pusat. Dengan rata-rata rasio kemandirian 21,54% artinya peranan pemerintah pusat kebidominan dibandingkan kemandirian pemerintah daerah atau dengan kata lain pemerintah daerah kabupaten Demak masih bergantung terhadap bantuan pihak eksternal. Pemerintah daerah Kabupaten Demak masih harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Yudi, 2016) untuk membiayai kegiatan rumah tangga pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat daerahnya.

### 2) Analisis Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah dihitung dengan membandingkan total pendapatan daerah dengan total belanja daerah yang menggambarkan persentase produktivitas daerah tersebut. Dengan semakin tinggi tingkat rasionya maka daerah tersebut bisa dikatakan lebih baik kinerjanya. Rasio kemampuan dari tahun 2016 ke tahun 2018 mengalami peningkatan yang berarti menunjukkan bahwa kemampuan dalam mengelola sudah terlaksana dengan baik. Tetapi pada tahun 2019 rasio ini mengalami penurunan sebanyak 2% dan mengalami peningkatan kembali 2% di tahun

2020. Dengan rata-rata 122,33% dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Demak sudah terlaksana sudah baik karena menunjukkan presentasinya di atas 100% atas dasar ini pemerintah daerah diharapkan dapat mempertahankan atau dapat menaikkan angka rasio kemampuan keuangan daerah dengan menambah pendapatan asli daerah yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan belanja daerah tersebut.

### 3) Analisis Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah adalah rasio yang menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengorganisasikan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah ditargetkan dengan membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target atau capaian penerimaan pendapatan asli daerah (Mahmudi, 2019:141). Pada tahun 2016, rasio efektivitas Kabupaten Demak sebesar 104,24%. Kinerja keuangan Kabupaten Demak berdasarkan rasio keefektifitas tergolong sangat efektif karena berada pada presentase di atas 100%. Hal tersebut menggambarkan pencapaian pendapatan asli daerah pada tahun 2016 melampaui target yang telah ditetapkan. Efektivitas terus meningkat namun pada tahun 2019 mulai menurun dan pada tahun 2020 rasio efektivitas kabupaten Demak mencapai tepat 119%. Dari data tersebut diperoleh rata-rata sebesar 110,33% yang berarti pemerintah daerah kabupaten Demak telah menjalankan tugas dengan baik dibuktikan dengan rata-rata rasio efisiensi menunjukkan di atas angka 100% walaupun dalam setiap tahun mengalami naik turun. Sesuai dengan angka tersebut pemerintah daerah kabupaten Demak dalam merealisasikan target anggaran pendapatan asli daerah sudah baik dan perlu ditingkatkan, hal ini didukung dengan adanya potensi-potensi baru yang masih berkembang sehingga dapat dimaksimalkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari potensi yang telah ada. Selain itu pengawasan dan evaluasi setiap tahun memiliki dampak yang signifikan untuk tahun berikutnya, sehingga menjadi lebih baik lagi.

### 4) Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini juga mampu menggambarkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah sehingga semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi, 2019). Rasio derajat desentralisasi fiskal diperoleh dengan membandingkan antara total pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah. Pada data analisis derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah kabupaten Demak dapat diketahui bahwa rasio per tahun fluktuatif. Berdasarkan perhitungan pada rasio derajat desentralisasi diketahui jika realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Demak dari tahun 2016 – 2020

mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Demak selama lima (5) tahun adalah sebesar 16,36%. Berdasarkan kriteria derajat desentralisasi fiskal persentase tersebut dikategorikan kurang baik, karena masih berada direntang interval 10-20% (Maemunah, 2020). Hal tersebut disebabkan derajat desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Demak dari tahun 2016 – 2020 memang terus mengalami peningkatan, namun tidak signifikan. Kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat juga mengalami peningkatan sehingga pendapatan transfer kembali mendominasi penerimaan pendapatan daerah. Dengan adanya penurunan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah menunjukkan kurang baiknya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal. Ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Demak memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan dan pemerintah daerah Kabupaten Demak perlu diperhatikan lagi untuk ke depannya agar pembangunan di Demak bisa terus meningkat dengan lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

#### **5) Analisis Rasio keserasian belanja**

Rasio keserasian belanja merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin maka semakin kecil persentase dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan (Halim, 2012). Berdasarkan analisis belanja operasi di atas dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir rata - rata 74,22% sesuai kriteria, hal ini menunjukkan bahwa hampir 75% belanja daerah digunakan untuk belanja operasi. Sedangkan analisis belanja modal selama 5 tahun terakhir memiliki rata - rata 25,50% jauh di bawah proporsi belanja operasi. Analisis keserasian belanja yang dihitung dari rasio belanja operasi terhadap rasio belanja modal selama 5 tahun rata - rata sebesar 74,22% artinya lebih dari setengah belanja daerah digunakan untuk belanja operasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa rasio belanja rutin selalu lebih besar daripada rasio belanja pembangunan, yang membuktikan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah Kabupaten Demak lebih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin atau belanja tidak langsung sehingga rasio belanja pembangunan atau belanja modal relatif kecil.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Demak sebagai berikut : (1) Kemandirian pemerintah daerah kabupaten Demak tahun 2016-2020 dengan rata-rata pada kisaran 0-25 yang berarti bersifat instruktif pemerintah daerah kabupaten Demak masih memiliki ketergantungan terhadap pihak luar, sehingga pemerintah kabupaten Demak masih harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerahnya. (2) Rasio kemampuan

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak rata-rata sebesar 122,33% menunjukkan prestasinya dan diharapkan hasil ini dapat dipertahankan atau semakin meningkat dari sisi pendapatan asli daerah. (3) Rasio efektivitas pendapatan asli daerah kabupaten Demak tergolong sangat efektif karena berada pada persentase di atas seratus persen berarti pemerintah daerah kabupaten Demak mampu menjalankan tugas serta melakukan evaluasi setiap tahun dan melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi yang baru berkembang untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. (4) Tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan digambarkan secara fluktuatif selama tahun 2016-2020 sebesar 16,36% dikategorikan kurang baik yang berakibat masih memerlukan transfer pendapatan dari pemerintah pusat. (5) Aktivitas pemerintah daerah Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa hampir tujuh puluh lima persen belanja daerah digunakan untuk belanja operasi atau belanja rutin daerah, yang menunjukkan kebutuhan belanja rutin atau belanja tidak langsung lebih diprioritaskan sehingga rasio belanja pembangunan atau belanja modal cenderung lebih kecil.

Secara keseluruhan hasil analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak menunjukkan kinerja yang baik tetapi masih ada beberapa rasio yang perlu adanya peningkatan seperti rasio kemandirian dan desentralisasi fiskal sehingga pemerintah daerah masih memiliki tugas untuk memperbaiki atau mempelajari lebih lanjut agar analisis laporan keuangan pemerintah daerah Demak secara keseluruhan menunjukkan hasil yang semakin baik.

## **SARAN**

Berdasarkan penelitian diatas pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengawasan pemungutan pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan kualitas, kecepatan pelayanan, kemudahan, ketepatan, dengan menyiapkan sistem administrasi dan komputerisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah harus mengembangkan Badan Usaha Millik Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ani, Ni Luh Nana Putri & Dwirandra, A.A.N.B. 2013. “*Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota*”. Journal Akuntansi Universitas Udayana 6.3 (2014): 481-497
- Bastian I dan G Soepriyanto. 2002. “*Sistem Akuntansi Sektor Publik: konsep untuk pemerintahan daerah*”. Edisi ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Chandarin, Grahita. 2018. “*Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*”. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwirandra,A.A.N.B. 2006, *Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom*

- Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006 Jurnal Ilmiah AKuntansi dan Bisnis Vol 3 no 2*
- Farida, A.S., dan Raden Faisal Maulana Nugraha. 2019. “*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang*”. Jurnal Pemikiran Administrasi Negara. Vol 11 No.2
- Halim Abdul, 2004. “*Manajemen Keuangan Daerah*”. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMD YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. “*Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*”. Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat
- Hasbar, Mustafa, 2010, “*Analisis kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan*” STIE Nobel Indonesia, Akmen Jurnal Ilmiah
- Hanik, F.U., dan Tutik Dwi Karyanti. 2014. “*Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagai Penilai Kinerja*”. JABPI Vol 22 No 2
- Kartika D, Setiawan AB dan IC Kusuma, 2016. “*Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi*”. Jurnal Sosial Humaniora Vol 7 No 2
- Liantino, Wita, 2018. “*Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam menilai keuangan pada kantor badan pendapatan pengelolaan dan kekayaan asset daerah (BPPKAD) di Kota Surakarta, skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Mardiasmo, 2004.”*Pengelolaan Keuangan Daerah*”. Jakarta. Tugu Ilmu
- Mahmudi. 2007. “*Manajemen Kinerja Sektor Publik*”. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cet 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad, 2011. “*Pengukuran Kinerja Sektor Publik*”. BPFE : Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. “*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi. 2013. “*Akuntansi Sektor Publik*”. Yogyakarta: UII Press
- Nurhayati., 2015. “*Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu*” skripsi.
- Ndaparoka, Susana R., Alfred T. Rantelobo. 2018. “*Model Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Kemandirian Fiskal Dan Derajat Ekonomi Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat*”. Kupang. Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Vol. 3 No. 1
- Prakoso, JA dan Fitrah Sari Islami, 2019. “*Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah*”. Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan Vol. 4 No.1
- Purnama, Fifit dan Nadirsyah. 2016. “*Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*”. Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 1, No. 2. Halaman. 01-15.
- Randria Ramadhani, 2016. “*Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015*”, Malang, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.14,

No.01

- Ramadani, Rani Febri. 2017. *“Analisis Kinerja Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Permerintah Kota Samarinda”*
- Rinaldi Syahputra 2017, *“Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang”*, Jurnal Samudra Ekonomika Vol 1 no 1
- Siahaan, Nina Rosalin. 2016. *“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang”*.
- Subekti, Ema Giyen dan Muhamad Hasanudin, 2014 *“Analisis Laporan Arus Kas pada Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2008-2009, TEKNIS, Vol 9 No 1*
- Supriadi, Yudi Nur. 2016. *“Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Wajar Tanpa Pengecualian Pada Pemerintah Kota Tangerang”*. Prosiding Forum Keuangan dan Bisnis V
- Susanto, Hery., 2014. *“Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat”*. Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol 10 No 1
- Trianto, Anton 2016, *“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang, Akuisisi”*, Jurnal Akuntansi, vol 12 no 1
- Tiyaningsih 2009, *“Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal kota Malang 2004-2008”*
- Widiyaningsih, VA dan Margaretha Prihatiningsih. 2021. *“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017-2019”*. Proceeding Seminar Nasional dan Call for Papers
- Vurry, AN., I Wayan Suwendra dan Fridayana Yudiaatmaja. 2018. *“Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Trend pada Pemerintah Kabupaten Buleleng”*.Jurnal Manajemen, Vol 4 No2.
- Zuhri, Muhammad dan Ahmad Soleh, 2015. *“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur”*. Ekombis Review.
- Perundang-undangan :
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD.